

ABSTRAK

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen kebijakan publik yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang, guna menciptakan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan arah pembangunan. Di Kota Lhokseumawe, Qanun Nomor 1 Tahun 2014 menetapkan jalur transportasi rel kereta api sebagai bagian dari strategi penataan wilayah. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan rel kereta api menimbulkan berbagai persoalan, seperti kedekatannya dengan permukiman warga dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi kebijakan RTRW secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap regulasi dan kondisi di lapangan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya pelaksana, rendahnya disposisi birokrasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menghambat sinkronisasi antara kebijakan tata ruang dengan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Kata Kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Implementasi Kebijakan, Rel Kereta Api, Kota Lhokseumawe

ABSTRACT

The Spatial Planning (RTRW) is a public policy instrument that serves as a guideline for controlling land use in order to create an orderly, sustainable spatial structure aligned with development goals. In Lhokseumawe City, Qanun Number 1 of 2014 designates the railway transportation corridor as part of the region's spatial planning strategy. However, its implementation has faced several issues, such as proximity to residential areas and weak inter-agency coordination. This research employs a descriptive qualitative approach to examine the implementation of the RTRW policy comprehensively. Data collection techniques include interviews, direct observation, and documentation of regulatory frameworks and field conditions. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. Findings indicate that the implementation of the RTRW has not been optimal. Key obstacles include insufficient public outreach, limited operational resources, low bureaucratic commitment, and ineffective coordination among relevant agencies. These factors hinder the alignment between spatial plans and infrastructure development. Therefore, a comprehensive policy evaluation, institutional capacity strengthening, and active community involvement in planning and implementation processes are essential.

Keywords: *Spatial Planning, Policy Implementation, Railway Infrastructure, Lhokseumawe City*